



Konstruksi Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal di Kartasura

Fetty Ernawati

IAIN Surakarta

Abstract

The main problem in this study was the increased number of students who enrolled education in Raudhatul Athfal (RA) was not corresponded to the improved quality of institution management. This study aims to obtain the description of education management quality in RA and to construct its management quality. The quality is perceived from the stakeholder's perception, needs, and wants. This study is a quantitative one. The data collection used questionnaire which is developed based on the standard of early childhood education, known as PAUD, in the Regulation of Minister of Education and Culture No. 137 of 2014 and was performed on 7 RA/BA in Kartasura, Sukoharjo, which have the establishments operating licenses. The research result showed that, 1) the implemented RA management referred to PAUD standard in the regulation. The quality problem was found in the quality of educators and educational staff, as well as facilities and infrastructures; 2) the construction of RA management quality was consistent with PAUD standard in the regulation and it was inseparable from the institutions ability to perform strategic and quality management.

Abstrak

Problem utama dalam penelitian ini adalah peningkatan jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di Raudhatul Athfal kurang diimbangi peningkatan mutu pengelolaan lembaga Raudhatul Athfal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mutu penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal dan mengkonstruksi mutu penyelenggaraan Raudhatul Athfal. Mutu dilihat dari persepsi stakeholder, dan kebutuhan serta kemauan stakeholder. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengambilan data menggunakan angket yang dikembangkan berdasarkan standar PAUD yang tercantum dalam Permendikbud Nomer 137 tahun 2014 dan dilakukan pada 7 RA/BA di wilayah Kartasura, Sukoharjo yang telah memiliki ijin operasional pendirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) penyelenggaraan RA yang telah dilakukan mengacu pada standar PAUD dalam Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014. Permasalahan mutu terletak pada mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana; 2) konstruksi mutu penyelenggaraan RA adalah penyelenggaraan RA sesuai dengan standar PAUD dalam Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014 dan mutu penyelenggaraan RA tidak terlepas dari kemampuan lembaga melakukan manajemen strategik dan manajemen mutu.

Keywords: Standard, Quality, PAUD

Coressponding author

Email: denfetty75@gmail.com

Pendahuluan

Data dari Kementerian Agama RI pada tahun 2014 ada sebanyak 1.074.131 jiwa anak usia dini yang mengikuti pendidikan di Raudhatul Athfal. Hal tersebut menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Peningkatan jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di Raudhatul Athfal menuntut lembaga Raudhatul Athfal berbenah dan meningkatkan mutunya. Berbagai perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Raudhatul Athfal.

Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dilakukan dengan menetapkan 8 (delapan) standar pendidikan yang dipandang mampu untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Kedelapan standar tersebut adalah: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Tim Peneliti dan Pengembangan Kementerian Agama RI pada tahun 2015 melakukan penelitian pada delapan wilayah, yaitu provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Sumut, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Nangro Aceh Darusalam. Penelitian tersebut menemukan masih banyak lembaga RA yang belum memenuhi standar minimal pada tenaga pendidik, terutama pemenuhan kualifikasi latarbelakang pendidikan yang bukan dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini atau sejenisnya. Demikian juga pada standar tenaga kependidikan masih banyak yang merangkap dari tenaga pendidik dan atau kepala RA. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga RA belum dikelola serius. Temuan lain dari Tim Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI adalah masih banyak lembaga RA yang belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana (republika.co.id, 2015)

Terkait mutu atau kualitas lembaga RA, masih banyak RA yang belum terakreditasi dan sebagian yang lain akreditasinya kadaluarsa. Hal tersebut menandakan pengelolaan lembaga RA belum sepenuhnya berorientasi pada mutu. Begitu pula yang terjadi di wilayah Kartasura Sukoharjo. Di Kecamatan Kartasura terdapat 8 RA, dan baru ada 2 RA yang terakreditasi yaitu RA Al-Muayyad Windan dan RA Ar-Rosyid. Selebihnya, 4 RA belum terakreditasi dan 2 RA baru mengurus ijin operasionalnya. Melihat dan membaca kondisi mutu RA tersebut, nampaknya masih dibutuhkan adanya penelitian tentang konstruksi mutu penyelenggaraan pendidikan RA.

Secara terminologis, mutu telah didefinisikan secara beragam, Edwards Deming mendefinisikan mutu sebagai *“a predictive degree of uniformity and dependability at a low cost, suited to the market”*. Dari definisi ini Deming kemudian menjabarkan mutu menurut konteks, persepsi customer, dan kebutuhan serta kemauan customer.

Mutu juga sering diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus sehingga dikenal istilah *Q-MATCH (Quality=Meets Agreed Terms and Changes)*.

Ada dua langkah yang harus dijalankan untuk mendapatkan mutu yang diinginkan, yaitu: (1) *Doing the right things right the first time, and (2) Doing it better and better.*”Rene T. Domingo (1994). Pada langkah pertama, menuntut adanya disiplin tinggi dengan jaminan bahwa tujuan yang dirumuskan sudah sempurna dan yakin dapat tercapai. Kedua adalah selalu berusaha mengerjakan yang paling baik terus menerus.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini menyatakan bahwa standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk (a) melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak; (b) Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan (c) Mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

Standar PAUD wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Beberapa penelitian telah dilakukan dalam rangka melihat pelaksanaan standar PAUD, diantaranya adalah penelitian tentang Evaluasi Program Implementasi Standar PAUD yang dilakukan oleh Anamara (2014) dan M. Fadhillah dengan penelitiannya yang berjudul *Komparasi Permendikbud No 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No 58 Tahun 2009 dalam Pembelajaran PAUD*.

Hasil penelitian M. Fadhillah (2016) adalah setelah dikeluarkannya Permendikbud No 137 Tahun 2014, maka pembelajaran PAUD tidak lagi mengacu pada Permendiknas No 58 Tahun 2009. Permendiknas No 58 Tahun 2009 adalah manifestasi dari KTSP, sedangkan Permendikbud No 137 Tahun 2014 adalah manifestasi diberlakukannya kurikulum 2013. Permendikbud No 137 Tahun 2014 dirancang untuk melengkapi dan menyempurnakan Permendiknas No 58 Tahun 2009.

Hasil penelitian Anamara (2014) di antaranya adalah pelaksanaan standar PAUD belum berjalan efektif, dimana kualifikasi akademik guru adalah tamatan SPGTK, kualifikasi akademik kepala sekolah setingkat DII PGTK, sekolah tidak memiliki kurikulum, program kegiatan semester dan rencana kegiatan mingguan/RKM disusun melalui wadah IGTKI, dan penilaian terhadap peserta didik belum dilakukan secara individu.

Penelitian-penelitian terdahulu menitikberatkan pada efektifitas pelaksanaan standar PAUD, sedangkan penelitian ini adalah ingin mengetahui mutu RA dengan melihat kesesuaian antara standar PAUD yang tercantum dalam Permendikbud No 137 Th 2014 dengan pelaksanaannya di lapangan, yaitu di RA/BA se-Kecamatan Kartasura menurut persepsi stakeholder dan konstruksi mutu penyelenggaraan PAUD oleh stakeholder. Stakeholder mempunyai peran penting dalam menentukan mutu. Berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang mutu penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal dan mengkonstruksi mutu penyelenggaraan Raudhatul Athfal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 RA/BA di wilayah Kartasura Sukoharjo. Sedangkan yang dijadikan sampel ada 7 RA/BA yang sudah memiliki ijin operasional pendirian. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah RA/BA yang sudah memiliki ijin operasional pendirian. Pengumpulan data menggunakan angket yang dikembangkan berdasarkan pada standar PAUD yang tercantum dalam Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014. Angket tersebut sebelumnya divalidasi oleh pakar evaluasi dan penelitian pendidikan, pakar mutu dan pakar anak usia dini.

Mutu Penyelenggaraan RA

Data tentang mutu penyelenggaraan RA diperoleh melalui angket tertutup yang disusun sesuai dengan standar PAUD yang tercantum dalam Permendikbud No 137 Tahun 2014 yang disebarkan kepada pengelola yayasan, kepala sekolah, dan guru pada 7 RA/BA di wilayah Kartasura yang sudah mempunyai ijin operasional. Keseluruhan responden adalah 50 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Responden Penelitian

No	Nama RA/BA	Jumlah Responden Yayasan	Jumlah Responden Kepala RA	Jumlah Responden Guru	Total Responden pada RA
1	BA Kertonatan	1	1	6	8
2	RA Al Hilal 3	1	1	7	9

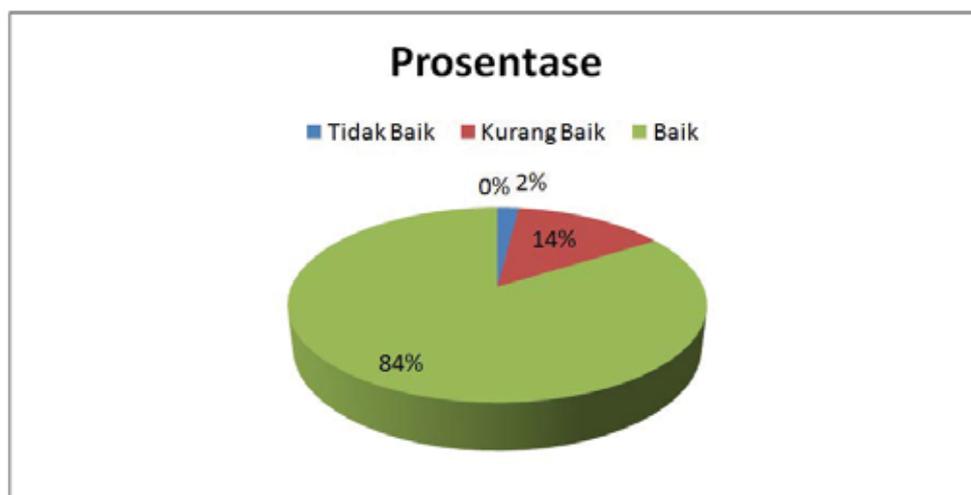
3	RA Umu Salamah	1	1	2	4
4	RA Taqiyya	1	1	11	13
5	RA Arrosyid	1	1	6	8
6	RA Al Muayad	1	1	3	5
7	RA Istiqomah	1	1	1	3
	T o t a l Responden	7	7	36	50

Dari angket yang telah terkumpul, diperoleh data sebagai berikut, nilai terendah 78; nilai tertinggi 129; mean 118,26; standar deviasi 8,91; median 119; modus 121. Adapun distribusi frekuensi data tentang mutu penyelenggaraan RA adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tabel Distribusi Frekuensi Mutu Penyelenggaraan RA

No	Skor	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	78-95	Tidak Baik	1	2
2	96-113	Kurang Baik	7	14
3	114-131	Baik	42	84
	Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden yaitu sebanyak 42 responden atau 84% menyatakan mutu penyelenggaraan RA pada kategori baik. 7 responden atau 14% menyatakan kurang baik dan hanya 1 orang atau 2% saja yang menyatakan tidak baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mutu penyelenggaraan RA adalah pada kategori baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Data lain yang bisa disajikan dalam penelitian ini adalah ada beberapa item angket yang memperoleh rata-rata skor di bawah 2,50 yaitu item nomer 5a, 5e, 5g, 5k dan 6e. Skor

masing-masing item tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nomer Item	Skor rata-rata
1.	5.a Kualifikasi Akademik Guru RA	2,26
2.	5.e Kualifikasi Akademik Guru Pendamping Muda RA	2,22
3.	5.g Kualifikasi Akademik Pengawas RA	2,48
4.	5.k Kualifikasi Akademik Tenaga Administrasi RA	2,30
5.	6.e Ruang UKS	1,78

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai rendah pada kualifikasi akademik guru RA, kualifikasi akademik guru pendamping muda RA, kualifikasi akademik pengawas RA, kualifikasi akademik, kualifikasi akademik tenaga administrasi RA dan ruang UKS. Dengan kata lain bahwa responden masih menganggap hal-hal yang tersebut di atas adalah belum memenuhi standar PAUD atau kurang bermutu.

Konstruksi Mutu Penyelenggaraan RA

Data tentang konstruksi mutu penyelenggaraan RA diperoleh melalui angket terbuka yang disebarakan kepada pengelola yayasan, kepala sekolah, dan guru pada 7 RA/BA di wilayah Kartasura yang sudah mempunyai ijin operasional. Angket yang disebarakan terdiri dari dua pertanyaan, yaitu tentang kriteria penyelenggaraan RA yang bermutu dan komponen-komponen yang menentukan mutu penyelenggaraan RA.

Data angket menunjukkan bahwa, ada sedikit perbedaan antara standar PAUD dengan pendapat responden. Rincian frekuensi dan prosentase jawaban responden dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Kriteria Penyelenggaraan RA

No	Kriteria	Frekuensi	Prosentase
1	Kriteria sesuai Standar PAUD	34	68%
2	Kriteria di Luar Standar PAUD	10	20%
3	Tidak Menjawab	6	12%
	Jumlah	50	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa, ada 34 responden atau 68% menyatakan kriteria penyelenggaraan RA yang bermutu adalah yang sesuai dengan standar PAUD, sementara 10 responden atau 20% menyatakan beberapa kriteria di luar kriteria yang telah ditetapkan pada standar PAUD. Perbedaan kriteria tersebut diantaranya adalah penyelenggaraan RA bermutu harus mempunyai struktur organisasi, visi misi yang jelas, ada

penjaminan mutu, ada SOP, standar dan sasaran mutu. Selebihnya ada 6 responden atau 12% yang tidak memberikan pendapatnya terkait dengan kriteria penyelenggaraan RA bermutu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

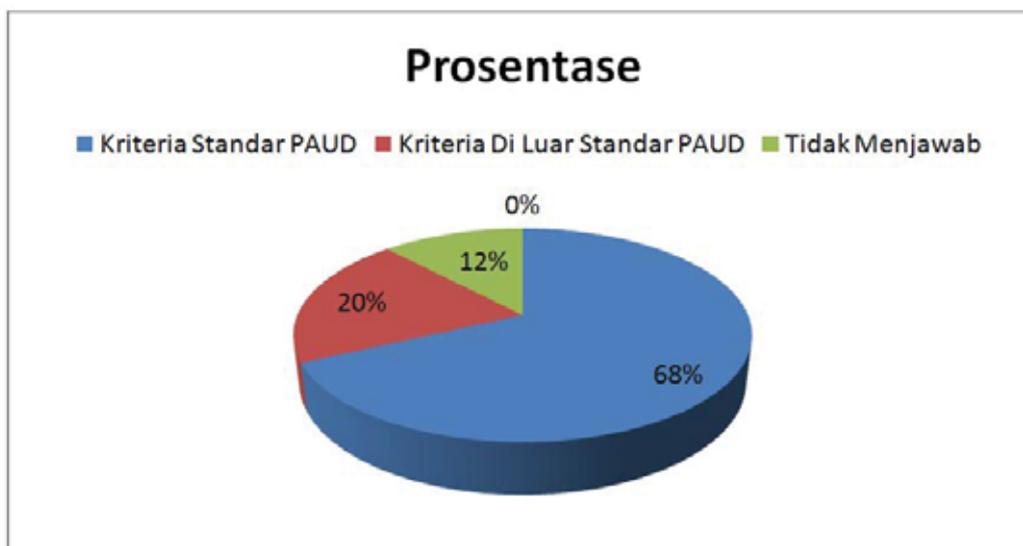


Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa kriteria-kriteria yang ada dalam standar PAUD sesuai kriteria penyelenggaraan RA bermutu. Sebagian yang lain menyatakan kriteria lain di luar kriteria yang ada dalam standar PAUD dan beberapa tidak memberikan pendapatnya.

Data angket selanjutnya yang bisa disajikan adalah tentang komponen-komponen yang menentukan mutu penyelenggaraan RA. Data angket menunjukkan bahwa, ada sedikit perbedaan antara komponen-komponen dalam standar PAUD dengan pendapat responden. Rincian frekuensi dan prosentase jawaban responden dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4

Distribusi Frekuensi Komponen Penyelenggaraan RA

No	Kriteria	Frekuensi	Prosentase
1	Komponen sesuai Standar PAUD	37	74%
2	Komponen di Luar Standar PAUD	7	14%
3	Tidak Menjawab	6	12%
	Jumlah	50	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa, ada 37 responden atau 74% menyatakan komponen penyelenggaraan RA yang bermutu adalah yang sesuai dengan standar PAUD, sementara 7 responden atau 14% menyatakan beberapa komponen di luar komponen yang telah ditetapkan pada standar PAUD. Perbedaan komponen tersebut adalah penyelenggaraan RA bermutu harus mempunyai ijin operasional pendirian RA. Selebihnya ada 6 responden atau 12% yang tidak memberikan pendapatnya terkait dengan komponen penyelenggaraan

RA bermutu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

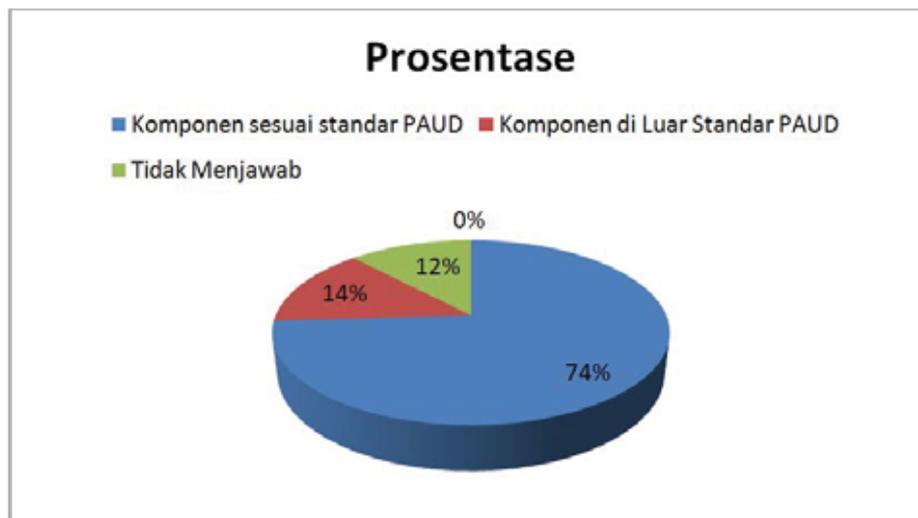


Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa di komponen-komponen yang ada dalam standar PAUD sesuai dengan komponen penyelenggaraan RA bermutu. Sebagian yang lain menyatakan komponen lain di luar komponen yang ada dalam standar PAUD dan beberapa tidak memberikan pendapatnya.

Berdasarkan deskripsi data di atas, ada beberapa hal perlu dicermati diantaranya adalah:

1. Mutu Penyelenggaraan RA

Menurut sebagian besar responden yaitu 84% menyatakan bahwa selama ini penyelenggaraan RA adalah pada kategori baik, khususnya penyelenggaraan RA di Kartasura. Penyelenggaraan RA yang selama ini sudah dilakukan telah mengacu pada standar PAUD yang tercantum dalam Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RA selama ini kurang baik. Responden sebagian mempunyai kriteria sendiri untuk mengkategorikan mutu penyelenggaraan RA.

Dilihat dari perolehan nilai rata-rata setiap item, menunjukkan bahwa rata-rata terendah diperoleh pada item tentang kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta pada item sarana prasarana khususnya pada ruang UKS. Data tersebut bisa dijadikan dasar untuk peningkatan mutu pendidikan RA khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dan peningkatan sarana prasarana.

Standar kualifikasi pendidikan saja sebenarnya belum cukup untuk dapat mengangkat kualitas pendidikan. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2015, guru harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.

Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan haruslah didasarkan pada harapan masyarakat. Mencermati beberapa permasalahan yang ada dan harapan masyarakat atas kualifikasi guru, maka sudah menjadi keharusan jurusan PGRA IAIN Surakarta sebagai lembaga penghasil guru RA menangkap hal tersebut sebagai bahan untuk menyusun program pendidikan dan kurikulumnya.

2. Konstruksi Mutu Penyelenggaraan RA

Berkaitan dengan konstruksi mutu penyelenggaraan RA, pembahasan dimulai dari kriteria penyelenggaraan RA bermutu. Sebagian besar responden menyatakan bahwa, penyelenggaraan RA selama ini sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan RA yang tercantum dalam standar PAUD. Komponen-komponen yang menentukan mutu penyelenggaraan RA juga sudah sesuai dengan komponen yang ada dalam standar PAUD. Hanya saja, ada sedikit perbedaan kriteria dan komponen dari responden. Perbedaan tersebut diantaranya adalah bahwa kriteria penyelenggaraan RA bermutu dengan penambahan kriteria harus mempunyai struktur organisasi, visi-misi yang jelas, ada penjaminan mutu, ada SOP, standar dan sasaran mutu. Sedangkan komponen yang menentukan mutu penyelenggaraan RA yang ditambahkan adalah ijin operasional pendirian dan penyelenggaraan RA. Dengan begitu mutu penyelenggaraan RA bisa dikonstruksikan sebagai berikut:

- a. Mutu penyelenggaraan RA sesuai dengan standar PAUD dalam Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014 dengan ditambahkan kriteria harus mempunyai struktur organisasi, visi-misi yang jelas, ada penjaminan mutu, ada SOP, standar dan sasaran mutu.
- b. Komponen-komponen yang harus ada dalam penyelenggaraan RA juga harus sesuai dengan standar PAUD yang tercantum dalam Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014 dengan ditambahkan komponen ijin operasional pendirian dan penyelenggaraan RA.

Tambahan kriteria dan komponen yang disampaikan responden sebenarnya telah termuat dalam standar pengelolaan PAUD, namun responden secara rinci menyebut beberapa hal yang menentukan mutu dan keberhasilan penyelenggaraan RA. Struktur organisasi, visi-misi yang jelas, ada penjaminan mutu, ada SOP, standar dan sasaran mutu memang merupakan hal-hal yang penting dalam penyelenggaraan suatu lembaga. Komponen-komponen tersebut relevan dengan komponen-komponen manajemen strategik.

Manajemen strategik menurut Nawawi (Akdon 2006, 10) adalah perencanaan berskala besar (perencanaan strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu yang berkualitas,

dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (tujuan strategik) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.

Walaupun ditetapkan pada tingkat pimpinan puncak, namun manajemen strategik perlu juga mendapatkan dukungan dari bawahan. Tujuan utama dari manajemen strategik adalah menciptakan kesejahteraan bagi para *stakeholder* sekolah melalui pemenuhan kebutuhan dan harapan para *stakeholder* lainnya.

Pembahasan tentang manajemen strategik tersebut menandakan bahwa responden mengharapkan penyelenggaraan RA mempunyai dasar yang kuat, serta arah yang jelas, sehingga akan terwujud RA yang bermutu.

Membuat sesuatu sesuai harapan pelanggan berarti bermutu. Dengan kata lain, suatu lembaga harus melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*). Di sini ada ukuran spesifikasi suatu jasa, atau mencapai keinginan pelanggan. Inilah maksudnya mutu. Sallis (1993, 24) mendefinisikan mutu adalah kepuasan terbaik dan tercapainya kebutuhan/keinginan pelanggan.

Mutu adalah mencapai apa yang diharapkan pelanggan. Pelanggan kemudian memantau harapan dan kepuasan, apakah tercapai atau tidak dalam pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga. Merujuk kepada Hoy, et al (2000, 15), dijelaskan bahwa: "*Quality is often defined in term of outcomes to match a customer's satisfaction*". Kesesuaian hasil dengan kepuasan pelanggan adalah indikator mutu yang harus dikejar setiap lembaga pendidikan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu adalah ukuran terhadap sesuatu yang diharapkan tercapai dari suatu produk atau layanan bagi para pelanggan yang ada.

Standarisasi adalah proses yang menetapkan standar-standar yang dijadikan patokan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan berkualitas unggul sesuai dengan harapan konsumen (Tilaar 2006, 21). Persoalan ini berkenaan dengan persoalan manajemen pendidikan. Namun hal itu, hanya merupakan bagian kecil dari upaya memberikan pelayanan yang memenuhi harapan pelanggan pendidikan.

Pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas perlu dicermati kembali, guna merumuskan perbaikan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini.

Kesimpulan

Penyelenggaraan RA yang telah dilakukan mengacu pada standar PAUD dalam Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014. Permasalahan mutu terletak pada mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana. Konstruksi mutu penyelenggaraan RA adalah penyelenggaraan RA sesuai dengan standar PAUD dalam Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014 dan mutu penyelenggaraan RA tidak terlepas dari kemampuan lembaga melakukan manajemen strategik dan manajemen mutu.

Referensi

- Arcaro, Jerome.S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Duffy, Francis M. 2002. *Step-Up-To-Excellence: An Innovative Approach to Managing and Rewarding Performance in School System*. London: The Scarecrow Press, Inc.
- Hoy, Charles, Colin Bayne Jardin and Margaret Wood. 2000. *Improving Quality in Education*. London: Longman Publishing Company
- Permendikbud Nomer 137 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional PAUD*
- Sallis, Edward. 1993. *Total Quality in Education*. London: Philadelphia
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Anderson, *et al.* (2011).A Theory of Quality Management Underlying The Deming Management Method. *Academy of Management (Online)*, Vol. 19, 39 halaman.
Tersedia:<http://www.jstor.org/stable/258936> (05/09/2011 23:07)
- <http://khazanah.republika.co.id>. 2015. Agar Raudhatul Athfal Bisa Penuhi Standar Nasional Paud. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

